

PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY

Dhimas Angga Permana
dhimasanggapermana@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out and to analyze the measurement of the Department of Communication and Information of Surabaya city in 2015 through the Value for Money approach. The research method has been conducted by using qualitative descriptive with the source of data is the primary and the secondary data. The research object is the performance of the Department of Communication and Information which is included in the performance statement (LKJ) of the Department of Communication and Information in 2015 periods. The performance assessment refers to the input indicator, output indicator, and outcome. The result of this research shows that the Department of Communication and information of Surabaya city from economic aspects refers to the budget (input) and budget realization. The efficiency assessment can be seen from the numbers of output realizations which have been generated to the input. Meanwhile, the effectiveness measurement can be seen from the output or even outcome which have been assessed and based on the institution objectives in implementing programs and activities by using standard of economic, efficiency, and effective. In assessing the performance effectiveness it is required to pay attention to the advantages which have been achieved by the public who have received the benefit of the implemented program.

Keywords: *Performance, value for money, economic, efficiency, effectivity.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2015 melalui pendekatan *Value for Money*. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan sumber data berupa data sekunder dan data primer. Objek yang diteliti adalah kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdapat pada Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015. Penilaian kinerja mengacu pada indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*). Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam segi ekonomi yang mengacu pada anggaran (*input*) dengan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi terlihat dari jumlah realisasi *output* yang dihasilkan terhadap *input*. Sedangkan pengukuran efektivitas dapat dilihat dari *output* maupun *outcome* yang dinilai berhasil berdasarkan tujuan instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan, dengan menggunakan ukuran ekonomi, efisien, dan efektif. Dalam menilai kinerja efektivitas perlu untuk memperhatikan manfaat yang telah diperoleh masyarakat yang menerima manfaat program yang dilaksanakan.

Kata kunci : Kinerja, *Value for Money*, ekonomis, efisien, efektivitas.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki pemerintahan yang bersih ekonomis, efektif, dan transparan sesuai pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*. Bentuk respon kesadaran tersebut dibuktikan dengan munculnya aspirasi

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, selain itu juga memiliki standar mutu untuk mengukur keberhasilan kinerja. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Disisi lain, organisasi sektor publik terkadang digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas, dan berbagai kritikan lainnya. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut, kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi tersebut mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif.

Penilaian terhadap suatu pelayanan dalam sebuah organisasi sektor publik merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi kelangsungan aktivitas organisasi sektor publik di dalamnya. Namun kualitas kerja dari beberapa pekerja tidak selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu saat situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut, sehingga menyebabkan penilaian terhadap prestasi kerja yang dihasilkan (*performance*) menjadi menurun.

Menurut Mardiasmo (2002:18) wujud dari perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Tingkat keberhasilan instansi pemerintah harus memperhatikan seluruh aktivitas yang diukur tidak semata-mata kepada *input* dari program instansi tetapi lebih ditekankan pada *output*, proses, manfaat, dan dampak dari program instansi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui suatu pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasar sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi sektor publik dibidang Komunikasi dan informatika yang baik dapat dilakukan dengan hasil pelaporan kinerja dan mengukur kinerja organisasi menurut pedoman kinerja organisasi pemerintah sebagai alternatif pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Hasil penelitian dari Arfan (2014) menyebutkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2012 telah menjalankan keseluruhan programnya dengan ekonomis, efisien, dan efektif namun terdapat satu program yang kurang efektif yaitu program Peningkatan Kesejahteraan Petani, karena pada pelaksanaannya capaian kinerja yang dihasilkan kurang maksimal yaitu sebesar 99,29%. Hasil penelitian dari Kurrohman (2013) menyebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomi dan efisien, tetapi tidak ditemukan perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio efektif.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh peneliti ini dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya diukur dengan perpektif *Value For Money*?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Surabaya diukur dengan perspektif *Value For Money*. Agar arah dalam penelitian ini tidak meluas dan menyimpang dari topik pokoknya, maka penelitian ini difokuskan untuk mengukur kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya pada tahun 2015.

TINJAUAN TEORETIS

Organisasi Sektor Publik

Dalam era sekarang ini, keberadaan organisasi sektor publik dapat dilihat di sekitar kita. Institusi pemerintahan, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan sejumlah organisasi lainnya yang memiliki aspek kepublikan termasuk dalam organisasi sektor publik. Menurut Mahsun (2006:14) organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Perpres No 29 tahun 2014 indikator kinerja ialah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Menurut Mardiasmo (2002:121) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud meliputi pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor public dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:12) Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Pemerintah berperan aktif dalam pembuatan regulasi dan pembuatan kebijakan pada organisasi sektor publik. Jadi maksud dari regulasi tersebut adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan dan lain sebagainya. Namun konsep tersebut sebenarnya memiliki muara yang tidak jauh berbeda, yaitu berusaha menciptakan masyarakat yang sejahtera, kemakmuran, kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat *output* yang dihasilkan oleh sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

Tujuan Pengukuran sektor Publik

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan kualitas barang dan jasa. Pada organisasi sektor publik, pengukuran keberhasilannya lebih kompleks, karena hal-hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang-kadang bersifat abstrak sehingga pengukuran tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel saja. Selama ini pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil jika dapat menyerap anggaran pemerintah seratus persen, meskipun hasil yang dicapai serta dampaknya masih berada jauh dari standar mutu. Sehingga pengukuran kinerja sektor publik menjadi sulit dan kompleks untuk disusun.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (2007:14) adalah: (a) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan (b) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi (c) Memperbaiki kinerja periode berikutnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (*achievement culture*) di dalam organisasi (d) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalkan kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau *punishment*, misalkan pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran (e) Memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi (f) Menciptakan akuntabilitas pegawai. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:122) secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah: (a) untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*) (b) untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi (c) untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*, dan (d) sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sektor publik tidak lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik (BPKP, 2000 dalam Mahsun (2006:33) :(a) memastikan pemahaman

para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja (b) memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati (c) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja (d) memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati (e) menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi (f) mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi (g) membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah (h) memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif (i) menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan (j) mengungkap permasalahan yang terjadi.

Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Metode yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Menurut Mahsun (2006:158) dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain : (a) Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi. Tujuan adalah pernyataan secara umum atau belum secara eksplisit (tentang apa yang ingin dicapai organisasi). Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi. Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat (b) Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian, tujuan, sasaran dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (*critical success factor*) dan indikator kinerja kunci (*key performance factor*). Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor pencapaian kinerja (c) Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran - sasaran Organisasi. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan (d) Evaluasi Kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja

dapat dijadikan *feedback* dan *reward-punishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas

Aspek Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini (Bastian, 2006: 331): (a) aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, (b) dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan, (c) informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi organisasi (d), dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi, (e) pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para *stakeholders*, (f) informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Bastian (2006:267). Yang menjelaskan bahwa: (a) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/ peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. (b) Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. (c) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). (d) Indikator manfaat (*benefits*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. (e) Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penilaian Kinerja Value For Money

Menurut Mahmudi (2007:81) *Value For Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi non profit (sektor publik) adalah *Value For Money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Dimana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah : (a) Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan *input* Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Bastian 2006:77). Sedangkan menurut Mahmudi (2007:82) Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar, Ekonomis berfokus pada *input*. Pengukuran ekonomis menurut Mahmudi (2007:82) dilakukan dengan perhitungan yang membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. (b) Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh

organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Bastian, 2006:77). Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Secara *absolute*, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Namun, berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang sama, dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya. Apabila rasionya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di perusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien (Bastian, 2006:208).

(c) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti ini bisa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian dari indikator hasil. (Bastian, 2006:267). Dari uraian ketiga elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa: ekonomi terkait dengan *input*, efisiensi terkait dengan *input* dan *output*, dan efektivitas terkait dengan *output* dan tujuan.

Manfaat Konsep Value For Money

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2002:130).

Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antara lain: (a) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. (b) Meningkatkan mutu pelayanan publik. (c) Menurunkan biaya pelayanan publik. (d) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. (e) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2002:7). Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

Pengukuran Kinerja Value For Money

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:89) pemanfaatan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu organisasi, aktivitas atau program telah memenuhi prinsip ekonomi, efisien, dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada titik pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut: (a) Biaya pelayanan (*cost of service*). Penentuan indikator kinerja harus mencakup indikator biaya, biasanya dinyatakan dalam biaya per unit. Indikator biaya ini merupakan elemen penting untuk mengukur ekonomi dan efisien. (b)

Tingkat pemanfaatan (*utilization rate*). Indikator tingkat pemanfaatan (utilisasi) diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kapasitas yang menganggur (*idle capacity*) atas sumber daya yang dimiliki organisasi. Tingkat utilisasi dapat diketahui dengan cara membandingkan tingkat pemanfaatan dengan kapasitas yang tersedia. (c) Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*). Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat kualitatif, misalnya kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, kecepatan respon, keramahan, kenyamanan, kebersihan, keamanan, keindahan (estetika), etika, dan sebagainya. (d) Cakupan pelayanan (*service coverage*). Indikator cakupan pelayanan diperlukan untuk mengetahui tingkat penyediaan pelayanan yang diberikan (*supply*) dengan permintaan pelayanan yang dibutuhkan (*demand*). (e) Kepuasan pelanggan (*citizen's satisfaction*). Kepuasan pelanggan merupakan salah satu bentuk hasil suatu pelayanan publik. Organisasi perlu melakukan penjangkauan aspirasi pelanggan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Untuk kemudahan indikator kepuasan pelanggan biasanya diproses dengan banyaknya aduan atau keluhan.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan objek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Penelitian deskriptif merupakan suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan tertentu dari subjek yang diteliti dan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan menggunakan perspektif *Value for Money*.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun data sekunder ini diperoleh dari laporan kinerja, selain itu juga membutuhkan data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terhadap obyek yang diteliti, dan data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (a) Survey Pendahuluan. Peneliti melakukan kunjungan awal pada objek penelitian untuk mengetahui gambaran secara umum objek penelitian serta situasi, kondisi, dan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. (b) Survey Lapangan. Peneliti melakukan tinjauan langsung pada objek penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan dengan melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara, seperti: Wawancara mendalam secara langsung dengan subjek penelitian, yaitu melakukan wawancara pada pihak yang berkompeten dengan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dan dokumentasi merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat langsung dokumen, catatan tertulis, arsip-arsip, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti mengumpulkan data-data objek penelitian dari tempat objek penelitian berupa gambaran umum objek penelitian, profil perusahaan, meliputi gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, lokasi dan bentuk perusahaan,

struktur organisasi serta visi dan misi perusahaan, laporan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.

Satuan Kajian

Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian, objek penelitian yang dibutuhkan: (a) Laporan Kinerja. Laporan kinerja menurut PP No. 8 Tahun 2006 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang di susun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN yang diimplementasikan dalam APBD. Laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan entitas ekonomi (b) Perspektif *Value For Money* yang mempunyai 3 elemen utama antara lain: pertama, Pengukuran Ekonomi. Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) sesuai dengan yang ditetapkan atau 100%. Kedua Pengukuran Efisiensi. Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan sumber daya (*input*) yang disediakan. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Dalam pengukuran kinerja *Value for Money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi, efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu. Dengan keterangan *output* adalah keluaran yang dicapai dari suatu kegiatan atau program sedangkan *Input* adalah segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar besarnya. Ketiga Pengukuran Efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting dalam efektivitas adalah efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tertentu melainkan hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur dengan membandingkan *Outcome* dengan *Output*. Suatu kinerja organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan melalui terlaksananya semua program atau kegiatan yang telah direncanakan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Pada tahap ini data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Tahapan penganalisaan data adalah sebagai berikut: (a) Untuk menganalisa efisiensi dan efektifitas kinerja menggunakan perbandingan antara data Satuan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Penganalisaan data dimulai dengan evaluasi penetapan pengukuran kinerja dengan tahapan sebagai berikut: pertama, menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Kedua, merumuskan indikator

dan ukuran kinerja. Ketiga, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Keempat, evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas). (b) Mengevaluasi pelaporan kinerja. Evaluasi pelaporan kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Ditinjau Dari Segi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka target anggaran yang bisa dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Anggaran Tahun 2015

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	Belanja langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)
2015	39.229.706.191	5.913.003.647	35.373.128.440	5.717.953.472
Total	45.142.709.838		41.091.081.912	

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2015

Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya. Dalam penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{41.091.081.912}{45.142.709.838} \times 100\% \\ &= 91\% \end{aligned}$$

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 sebesar Rp 45.142.709.838. Sedangkan realisasi belanja tahun 2015 adalah sebesar Rp 41.091.081.912 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5.717.953.472 sedangkan belanja langsung sebesar Rp 35.373.128.440.

Pengukuran ekonomis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2015 berada dalam kategori ekonomis. karena suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Terjadi pengurangan pada anggaran tahun 2015 yang disebabkan oleh proses tepat guna pendanaan yang digunakan untuk pembangunan sarana jaringan di Kota Surabaya. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2015 anggaran yang ditargetkan untuk pembangunan sarana jaringan sebesar Rp 328.905.860 sedangkan realisasinya sebesar Rp 284.438.535. Berarti ada penghematan dana sebesar Rp 44.467.325.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pengertian pengukuran ekonomis suatu kinerja organisasi, dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) sesuai dengan yang ditetapkan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Ditinjau Dari Segi Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Bastian, 2006:77). Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Perhitungan Kinerja dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya ditinjau dari efisiensi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Pengukuran Efisiensi Tahun 2015

NO	PROGRAM	KEGIATAN ATAU SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran (bulan)	1.721.439.073	1.433.127.056	83,25%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran (bulan)	2.024.650.570	1.413.285.167	69,80%
3.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Publikasi Penyelenggara n Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Publikasi Penyelenggara n Pembangunan Daerah yang dilakukan (kali)	2.187.931.575	1.820.344.080	83,20%
		Pengelolaan & Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang diupload di website www.surabaya.go.id (materi)	655.060.855	587.076.547	89,62%
4.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemanfaatan Jasa Internet untuk Pendidikan	Waktu pelaksanaan pemanfaatan layanan internet pada 5 lokasi	87.042.630	86.165.730	98,99%
5.	Program Peningkatan Pemanfaatan	Pembangunan Sarana Jaringan	Pembangunan CCTV sebanyak (titik)	6.558.741.765	6.286.732.277	95,85%

Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunikasi dan Informasi				
	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data (sistem)	993.307.304	978.109.785	98,47%
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Waktu Pelaksanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (bulan)	932.577.720	868.540.056	93,13%
	Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Waktu Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi (bulan)	184.356.570	172.512.906	93,58%
	Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Jumlah Pembangunan Grounding Gedung Pemerintah Kota Surabaya (gedung)	328.905.860	284.438.535	86,48%
	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi (Bulan)	2.299.178.134	1.999.900.728	86,98%
	Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	Waktu Pelaksanaan Pengawasan Mengenai Pemanfaatan Menara Bersama yang dilakukan (bulan)	395.318.740	316.098.852	79,96%

		Peningkatan dan Pendayagunaan Opensource Software	Terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan opensource software (Bulan)	440.530.450	409.838.939	93,03%
		Sosialisasi Pemanfaatan Pelayanan Publik Berbasis TIK	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pembinaan TIK (bulan)	2.750.202.093	2.088.278.612	75,93%
6.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelayanan Keluhan / Pengaduan Masyarakat	Waktu Pelayanan Keluhan / Pengaduan Masyarakat (bulan)	295.697.860	270.925.948	91,62%

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selama tahun 2015 secara umum dapat dikatakan efisien. Penilaian efisiensi terlihat dari capaian atau realisasi dari indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam merealisasikan kegiatan operasi terhadap indikator masukan (*input*) yang digunakan. Seperti yang bisa dilihat dari tabel efisiensi di atas, yang menjelaskan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kegiatan pelaksanaan pemanfaatan layanan internet dilaksanakan dengan output waktu pada 5 lokasi selama 12 bulan yang terealisasi 100% dari yang ditargetkan, dan menekan angka pengeluaran anggaran sebesar Rp 876.900 yang sebelumnya rencana anggaran sebesar Rp 87.042.630 namun yang terealisasi sebesar Rp 86.165.730 sehingga capaian kerjanya mencapai 98,99%.

Dari hasil diatas sesuai dengan pengukuran efisiensi hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Ditinjau Dari Segi Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting dalam efektivitas adalah efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tertentu melainkan hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kinerja organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan melalui terlaksananya semua program/kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian efektivitas dari sasaran - sasaran program, maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3
Skala Ordinal Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang

4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2015

Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya ditinjau dari segi Efektivitas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Pengukuran Efektivitas Tahun 2015

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Formulasi Indikator	Capaian Kinerja
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran (bulan)	Realisasi penyediaan barang dan jasa : target penyediaan barang dan jasa	$12/12 \times 100\% = 100\%$
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran (bulan)	Realisasi pengadaan dan pemeliharaan : target pengadaan dan pemeliharaan	$12/12 \times 100\% = 100\%$
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang dilakukan (kali)	Jumlah kegiatan publikasi : target kegiatan publikasi	$78/78 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah data dan informasi yang diupload di websitewww.surabaya.go.id (materi)	Jumlah data dan informasi yang diupload di <i>website</i> : target data dan informasi yang diupload di <i>website</i>	$1883/1872 \times 100\% = 101\%$
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Waktu pelaksanaan pemanfaatan layanan internet pada 5 lokasi	Realisasi pelaksanaan pemanfaatan layanan internet pada 5 lokasi : Target pelaksanaan pemanfaatan layanan internet pada 5 lokasi	$12/12 \times 100\% = 100\%$
5	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pembangunan CCTV sebanyak (titik)	Jumlah pembangunan CCTV : target prmbangunan CCTV	$196/196 \times 100\% = 100\%$
		Waktu Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi (bulan)	Realisasi Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi : target Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	$12/12 \times 100\% = 100\%$
		Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi ke Pusat Data (sistem)	Realisasi jumlah sistem informasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen : target jumlah sistem informasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen	$10/10 \times 100\% = 100\%$
		Waktu Pelaksanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (bulan)	Realisasi Pelaksanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik : target Pelaksanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	$12/12 \times 100\% = 100\%$

		Informasi Pelayanan Publik	
	Waktu Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi (bulan)	Realisasi Waktu Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi : Target Waktu Pengawasan dan Penertiban Perijinan dan Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	$12/12 \times 100 \% = 100\%$
	Jumlah Pembangunan <i>Grounding</i> Gedung Pemerintah Kota Surabaya (gedung)	Realisasi jumlah pembangunan <i>grounding</i> gedung : Target jumlah pembangunan <i>grounding</i> gedung	$65/65 \times 100 \% = 100\%$
	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi (Bulan)	Realisasi pelaksanaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi : target pelaksanaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi	$12/12 \times 100 \% = 100\%$
	Waktu Pelaksanaan Pengawasan Mengenai Pemanfaatan Menara Bersama yang dilakukan (bulan)	Realisasi pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama : Target pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama	$12/12 \times 100 \% = 100\%$
	Terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan <i>opensourcesoftware</i> (Bulan)	Realisasi terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan <i>opensourcesoftware</i> : Target terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan <i>opensourcesoftware</i>	$12/12 \times 100 \% = 100\%$
	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pembinaan TIK (bulan)	Realisasi penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan TIK : Target penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan TIK	$12/12 \times 100 \% = 100\%$
6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Waktu Pelayanan Keluhan / Pengaduan Masyarakat (bulan)	Realisasi pelayanan keluhan / pengaduan masyarakat : target pelayanan keluhan / pengaduan masyarakat	$12/12 \times 100 \% = 100\%$

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa target Indikator Kinerja Program (*outcome*) tercapai sangat tinggi dan memunculkan 4 (empat) sasaran Utama beserta program/kegiatan pendukungnya, sebagai berikut : (a) Sasaran 1: Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik yang ditandai dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Sasaran utama ini memiliki program utama, yakni mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama adalah presentase jumlah keluhan yang selesai ditindaklanjuti dalam kurun waktu 12 (duabelas) bulan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan pendukung, yakni Pelayanan Keluhan/pengaduan Masyarakat dengan Target *Output* 12 bulan dan

anggaran sebesar Rp 295.697.860. Realisasi dari sasaran utama ini adalah tindak lanjut keluhan masyarakat yang telah ditangani seluruhnya (100%) dalam 12 bulan, dengan anggaran terserap sebesar Rp 270.925.948. Dengan demikian realisasi capaian kinerja sasaran utama ini adalah 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). (b) Sasaran 2: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan peningkatan kualitas layanan publik. Sasaran utama ini memiliki program utama, yakni pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa dengan target outcome jumlah kunjungan rata-rata per bulan pada website www.surabaya.go.id sebanyak 56.453 kunjungan. Terealisasi 155.262 Kunjungan selama tahun 2015 atau 275,03%. Sasaran ini didukung 3 (tiga) kegiatan, yakni 1). Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, 2). Publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah dengan output jumlah kegiatan publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan 3). Pengelolaan dan Pengumpulan data Informasi pembangunan daerah. Dari 3 (tiga) kegiatan tersebut, realisasi rata-rata capaian kinerja sasaran utama ini adalah 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). (c) Sasaran 3: Peningkatan daya saing kota untuk mendukung iklim investasi. Sasaran utama ini memiliki program utama, yakni Peningkatan pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi dengan 2 (dua) indikator utama, yakni 1). Presentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik yang ditargetkan sebanyak 25 sistem atau 23,15% terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 29 sistem atau 26,85%, sehingga tingkat kinerja mencapai 115,98%. Dan 2). Presentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK ditargetkan sebanyak 8%, terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 39,23%, sehingga tingkat kinerja mencapai 490,26%. Sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) kegiatan. Dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut, realisasi rata-rata capaian kinerja sasaran utama ini adalah 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). (d) Sasaran 4: Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sasaran utama ini memiliki program utama, yakni program wajib belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan 1 (satu) kegiatan pendukung, yakni Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan. Sedangkan Indikator Kinerja Programnya (outcome) adalah Waktu Pelaksanaan Pemanfaatan Layanan Internet pada 5 Lokasi selama 12 bulan. Target anggaran SKPD yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar Rp 87.042.630. Realisasi dari sasaran utama ini adalah terpantainya pemanfaatan internet untuk menunjang program wajib belajar selama 12 bulan, dengan total anggaran terserap Rp 86.165.730 atau 99%. Dengan demikian realisasi capaian kinerja sasaran utama ini adalah 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Dari semua program yang dilaksanakan mempunyai nilai capaian efektivitas $91\% \leq 100\%$ yang menurut skala ordinal masuk dalam kategori sangat tinggi (ST). Semua program/kegiatan yang telah direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dapat terlaksanakan semua dengan begitu tujuan di tahun 2015 telah tercapai. Adapun program yang melebihi target dari yang ditentukan yaitu pada program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebesar 101%. Ini dikarenakan adanya pengelolaan media *center* yang berfungsi untuk menampung partisipasi masyarakat baik dalam bentuk keluhan, informasi maupun saran pada proses pembangunan kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, produksi buku profil Surabaya yang berfungsi untuk menambah daya tarik masyarakat dengan mengemas secara menarik, dan produksi film profil dan film dokumentasi pembangunan Kota Surabaya sehingga masyarakat maupun tamu-tamu dari luar Kota Surabaya melihat dan memperoleh gambaran profil Kota Surabaya. Walaupun hasil dari program ini melebihi target bukan berarti program ini tidak efektif, melainkan tetap efektif.

Pengembangan model pengukuran kinerja efektivitas dengan memperhatikan manfaat yang diperoleh masyarakat dari program yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya telah sesuai dengan manfaat implementasi konsep *Value for Money* yang lebih memperhatikan kualitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat

sasaran. Terlihat dari Laporan Kinerja Tahun 2015 realisasi capaian seluruh sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa diantaranya melampaui target karena pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Simpulan Dan Saran

Menurut hasil analisis dan pembahasan tentang Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Value For Money*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari tingkat ekonomisnya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selama tahun 2015 dapat dikatakan dalam kategori ekonomis atau lebih hemat. Dikarenakan realisasi pengeluaran lebih kecil daripada anggaran pengeluaran, walaupun adanya penghematan tetapi semua program dapat terlaksana sesuai dengan harapan di tahun 2015. (b) Hasil Pengukuran ditinjau dari tingkat efisiensinya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selama tahun 2015 dapat dikatakan efisien. Hal ini diukur dengan berdasarkan perbandingan antara *output* terhadap *input*, dimana rencana program kerja dan kegiatan organisasi disektor publik Komunikasi dapat dicapai dan direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan selama tahun 2015. (c) Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari tingkat efektivitasnya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya pada tahun 2015 dikatakan efektif. Hal ini diketahui berdasarkan hasil yang dicapai dimana *output* maupun *outcome* telah berhasil dilaksanakan secara efektif dan semua program yang direncanakan mencapai target yang telah ditetapkan

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dan bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu: (a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun selanjutnya, agar tercipta *good government* dan sukses dalam membangun sektor Komunikasi dan Informatika di Kota Surabaya secara ekonomis, efisien dan efektif. (b) Untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya hendaknya selalu berinovasi dan menciptakan sesuatu sistem atau aplikasi yang mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan yang ada di Kota Surabaya agar kegiatan berjalan semakin baik lagi dan mampu mencapai tujuan serta sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. (c) Perlu dilakukan pengembangan model pengukuran kinerja berdasarkan *value for money*, keluarannya dalam memakai kinerja efektivitas. Kinerja efektivitas harus memperoleh *outcome*, yaitu manfaat program yang telah diperoleh masyarakat. (d) Penelitian selanjutnya diharapkan dalam mengukur kinerja suatu organisasi tidak hanya menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi menggunakan elemen yang lain agar penelitian tersebut lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, D. A. 2014. Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011 - 2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kurrohman, T. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value for Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5 (1): 1-11.
- LAN dan BPKP. 2000. *Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah*. Cetakan pertama. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Erlangga. Yogyakarta.
- Nilasari, D. 2009. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Brawijaya. Malang.
- Nordiawan. D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nugrahani, T. A. 2007. Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akmenika* 1: 1-17.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 *Organisasi Perangkat Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4741.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 3 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 21 April 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80. Jakarta.